

**Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam
Memberdayakan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Dukuh Desa
Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)**

*Role of Village Community Empowerment Institutions in Empowering the
Community (Case Study of Dusun Dukuh, Donokerto Village
Turi District, Sleman Regency)*

Sukeji*, Budi Widayanto, Daru Retnowati

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur Yogyakarta Indonesia 55283

*Email korespondensi: sakesi028@gmail.com

Diterima tanggal : 15 Juli 2022 ; Disetujui tanggal : 27 Desember 2022

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Village Community Empowerment Institution in empowering the community to examine the factors that influence the process of empowerment in Dukuh village. This research uses a qualitative approach. The technique of determining the informants is purposive sampling and the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are using observation, interviews and documentation by testing the valisity of the data using source triangulation. Data analysis techniques are collecting data, reducing data, presenting data and conclusions. The result showed that the village community empowerment institution carried out the process of implementing a work program in a structured manner through planning, organizing, implementing and supervising. In empowering the community, LPMD makes work programs that come form community proposals through hamlet meetings and village meetings, work program proposals continue to be developed until the liquid funding stage and the work program implementation process involves monitoring and evaluating work programs. In realizing the work program, there are supporting factors in the form of community participation, government policies and funding. LPMD in realizing empowerment through work programs in the form of managerial roles in the form of planning starting from preparing development plans and providing assistance to the community, institutions carrying out both tasks and functions in accordance with the authority and organizational structure, institutions carrying out implementation by participating directly in carrying out work programs, institutions carrying out supervision and evaluation starting from motivating the community coordinate work programs and directives. there are two supporting factors in realizing empowerment in Dukuh village are internal factors of natural resources and human resources, exsternal factors are government policies, funding, and work programs.

Keywords: Role, Village Community Empowerment Institution (LPMD), Empowering.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam memberdayakan masyarakat, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan secara *purposive sampling* yaitu kepala dukuh, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik analisis data yaitu dengan mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, hasil penelitian ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan proses pelaksanaan program kerja secara terstruktur melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam memberdayakan masyarakat Dusun Dukuh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa membuat program kerja yang berasal dari usulan masyarakat melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa, usulan program kerja terus dikembangkan sampai pada tahap pendanaan cair dan proses pelaksanaan program kerja melibatkan pengawasan serta evaluasi program kerja. Dalam mewujudkan program kerja terdapat faktor yang mendukung berupa adanya partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan pendanaan. Dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dalam proses pemberdayaan di Dusun Dukuh melalui program kerja berupa peran manajerial berupa perencanaan mulai dari menyusun rencana pembangunan dan melakukan pendampingan kepada masyarakat, lembaga melakukan pengorganisasian baik tugas maupun fungsi sesuai dengan wewenang dan struktur organisasi, lembaga melakukan pelaksanaan dengan ikut terjun langsung dalam menjalankan program kerja, lembaga melakukan pengawasan dan evaluasi mulai dari memotivasi masyarakat melakukan koordinasi program kerja dan pengarahan. terdapat dua faktor pendukung dalam proses pemberdayaan di Dusun Dukuh yaitu faktor internal SDA dan SDM, faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, pendanaan, dan program kerja.

Kata kunci: Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Memberdayakan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan Nasional lewat pembangunan daerah, kota dan desa. Pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan, adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, salah satu faktor yang memicu adanya ketimpangan ialah tidak

meratanya pembangunan yang berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia (Nafidah dan Suryaningtyas, 2016). Terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di perdesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perdesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa. Terhadap pembangunan desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakat (Widjaja, 2014).

Dalam proses mewujudkan harapan tersebut pemerintah Indonesia telah merancang peraturan yang mengamanatkan agar setiap desa perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan desa. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewadahi, memotivasi serta mengajak masyarakat desa dalam membangun desa serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan desa.

LPMD ditingkat Dusun Dukuh ini dibentuk dengan harapan agar aspirasi masyarakat di Desa Donokerto dapat disalurkan dan diwujudkan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, selain itu dapat membantu meringankan beban kepala Desa dalam merancang pembangunan Desa. Pemberdayaan di Dusun Dukuh lebih menonjolkan masyarakat sebagai pelaku utama, dimana gotong royong dalam melakukan pembangunan Desa dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat Dusun Dukuh. Dalam melakukan pembangunan dan partisipasi, LPMD memiliki peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait program yang dijalankan, hal ini sesuai dengan fungsi LPMD yaitu sebagai lembaga pemberdayaan di tingkat masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dusun Dukuh, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan mulai dari Mei 2021. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek Jenis penelitian kualitatif yang akan digunakan yaitu berupa studi kasus, menurut Sumiawan (2010), studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.

Untuk memperoleh sumber data yang tepat dan akurat peneliti mengklasifikasikan informan menjadi beberapa bagian, terdapat informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang topik yang diangkat oleh peneliti, pada penelitian ini informan kunci yaitu pimpinan lurah. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, pada penelitian ini informan utama adalah ketua dan bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh. Informan tambahan merupakan seseorang dapat memberikan informasi sekunder dalam data utama terkait penelitian yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci, pada penelitian ini informan pendukung yaitu masyarakat yang terlibat dan tidak terlibat dalam program kerja LPMD.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam menentukan keabsahan data, triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tujuan peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh di lapangan dengan memanfaatkan sesuatu

yang lain Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan secara urut oleh peneliti mulai dari reduksi data, reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data direduksi data dilakukan penyajian data, penyajian data dilakukan sebagai rangkaian setelah reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut. Setelah penyajian data dilakukan penerikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga simpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Dukuh adalah bagian dari Desa Donokerto yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Sebagian besar wilayah Dusun Dukuh merupakan lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Dusun Dukuh bermata pencaharian sebagai petani. Dusun Dukuh memiliki kelompok Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD). LPMD pada awalnya memiliki jumlah anggota 9 orang dan berkembang sampai saat ini menjadi 42 anggota. Alasan dasar dibentuknya LPMD tingkat dusun yaitu membantu meringankan beban kepala desa, dimana Desa Donokerto yang terdiri dari 16 dukuh dan berbagai macam tipe masyarakat yang memiliki kemauan berbeda-beda. Tujuan dibentuknya LPMD yaitu membantu mewujudkan pemberdayaan di Dusun Dukuh melalui program kerja yang terstruktur.

Program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh antara lain: pembangunan irigasi persawahan dan talub, program penghijauan pembagian

benih cabe dan sayuran, dan pembangunan jalan akses penghubung desa. pembangunan irigasi persawahan dan talud dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) dengan tujuan mempermudah irigasi pertanian di sepanjang padukuhan donokerto, dengan adanya pembangunan talud petani lebih terbantu dalam mengairi sawah, program ini diawali dengan pembersihan saluran air di pinggir persawahan sepanjang Dusun Dukuh, selanjutnya dibangun talud. Semenjak dibangunnya irigasi dan talud masyarakat Dusun Dukuh lebih efektif dalam meringkas pengairan sawah, dana yang dikeluarkan untuk pembayaran air tidak sebanyak sebelum adanya talud, masyarakat juga secara bersama-sama membuat jadwal pengairan per Dusun dengan harapan agar sesama petani tidak berebut air untuk pertanian.

Program penghijauan pembagian benih cabe dan sayuran, program ini merupakan program penghijauan dari rumah ke rumah, setiap rumah warga diberikan *polybag*, benih, dan pupuk tanaman. Setiap rumah warga wajib menjaga dan merawat tanaman dengan baik, benih tanaman yang diberikan mulai dari tanaman tomat, cabai, daun bawang, sawi dan kangkung. Program penghijauan dilakukan dengan tujuan menjaga lingkungan sekitar dan menumbuh kembangkan peduli lingkungan di lingkup padukuhan.

Program pembangunan jalan akses penghubung desa merupakan program kerja yang diawali dengan pengecoran jalan blok, pembangunan jalan ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dari dusun ke dusun, selain itu jalan yang merupakan salah satu bagian penting dari transportasi penduduk, sebagian besar petani mengangkut hasil pertanian dengan memanfaatkan jalan desa sehingga agar lebih mempermudah masyarakat program kerja pembangunan jalan akses penghubung desa dijalankan. Dengan dibangunnya akses jalan utama penghubung desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat.

Sebagai penerima program masyarakat merasa terbantu dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh berperan sebagai alat komunikasi atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan

keputusan, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dirancang untuk melayani masyarakat Dusun Dukuh. Dilihat dalam proses pelaksanaan program kerja yang dilakukan terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan diawali dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) melakukan pengenalan kepada masyarakat (mempelopori). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Dukuh mengenai lembaga baik dari segi tugas, fungsi, tujuan, visi-misi, anggota dll. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dapat lebih dekat dengan masyarakat sebagai elemen utama dalam pelaksanaan program kerja. Penyusunan program kerja dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh, melalui ide dan gagasan oleh masyarakat selanjutnya dilakukan penyusunan dan diajukan ke kelurahan. Masyarakat sebagai penerima manfaat diharapkan dapat ikut serta dalam kegiatan.

Pelaksanaan dilakukan masyarakat Dusun Dukuh melalui gotong royong, pelaksanaan dilakukan setelah pendanaan yang berasal dari pemerintah telah disetujui dan dicairkan, pemerintah merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sebagai pendukung keuangan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten sleman nomor 3 tahun 2004 tentang lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan bahwa Desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat salah satu bentuk aturan tersebut diwujudkan dalam badan perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD yang membantu pemerintahan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga yang dimaksud dalam BPD pada BAB II pasal 2 yaitu lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat, salah satu bentuknya merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Desa (LPMD), dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Desa dapat membentuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa tingkat padukuhan. Hal ini diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2004 BAB IV pasal 9 paragraf 4 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pada pelaksanaan program kerja masyarakat mengambil bagian dalam proses pelaksanaan, baik dalam mengajukan aspirasi sampai pada tahap program dijalankan. Keikutsertaan masyarakat baik dalam perencanaan sampai tahap pelaksanaan menjadikan program kerja dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam proses pelaksanaan seringkali ada anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) dan juga masyarakat tidak memberikan partisipasi dalam pelaksanaan program saat hari berlangsung, hal ini dikarenakan masyarakat dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) masih sungkan untuk meninggalkan pekerjaannya, Perlu dilakukan pendekatan yang lebih dari lembaga dalam merangkul masyarakat, sehingga timbul loyalitas dalam membangun dan rasa memiliki dusun.

Dalam pelaksanaan dilakukan pengawasan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dimana pengawasan dilakukan agar pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan awal, tujuannya meminimalisir kegagalan dan dapat menghasilkan sebuah program kerja yang sesuai perencanaan yang bertujuan untuk memperkecil dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sule dan Saefullah (2005) yang menyatakan bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Ketika program kerja selesai dilaksanakan dilakukan evaluasi secara langsung dan bersifat non formal, tidak wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Dukuh, pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) hanya sampai merealisasikan usulan masyarakat dengan bentuk program kerja yang sudah terlaksana dan belum ada tindakan lanjutan setelah program kerja selesai. Alangkah lebih baiknya apabila program kerja yang telah dilaksanakan dilakukan tindakan lebih lanjut, sehingga

program kerja tidak berhenti setelah pengerjaan selesai. Belum adanya tindakan lanjutan setelah program kerja selesai dilaksanakan dikarenakan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) masih dalam tahap mengupayakan pemberdayaan, beberapa anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) tidak terlalu aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan kurangnya motivasi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan bisa dilakukan sosialisasi terhadap anggota LPMD mengenai konsep pemberdayaan. Sehingga adanya peningkatan SDM khususnya pada bagian SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh, konsep pemberdayaan yang sesuai dan dipahami oleh Lembaga dapat memberikan peningkatan baik loyalitas dalam menjalankan organisasi dan loyalitas dalam membangun partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat terbentuk dengan bantuan peran Lembaga dalam menjalin sosialisasi dan motivasi dalam menjalankan program kerja. Dalam mewujudkan pemberdayaan diperlukan partisipasi aktif masyarakat sehingga menciptakan peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dimana keberhasilan program kerja dilihat dari partisipasi masyarakat secara aktif dan partisipatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutoro Eko (2002) masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Dengan harapan program kerja yang telah selesai dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh memiliki dampak terhadap masyarakat baik dalam keberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif. Keberdayaan dapat diukur pada aspek: tingkat kesadaran dan keingintahuan untuk berubah (*power to*), tingkat kemampuan untuk meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power with in*), tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*) dan

tingkat kemampuan Kerjasama dan solidaritas (*power with*). Terdapat beberapa aspek yang sudah terlihat dalam partisipasi masyarakat melalui program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh, tingkat kesadaran dan keingintahuan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi dalam musyawarah dusun masyarakat memberikan masukan dan gagasan untuk pembangunan dusun. Selanjutnya terdapat kemampuan Kerjasama dalam gotong royong. Keberdayaan merupakan unsur yang memungkinkan masyarakat bertahan dan mengembangkan diri mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suryana (2011) dimana memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) memberi dampak positif bagi masyarakat Dusun Dukuh yaitu terbantunya dalam bidang pembangunan, pertanian, infrastruktur, sosial dan keagamaan dll. Mudahnya akses dalam penyaluran hasil pertanian termasuk dalam kemudahan irigasi persawahan menjadikan masyarakat terbantu dan meningkatnya pemanfaatan sumber daya. Terbentuknya UMKM dalam membuat olahan-olahan dan kerajinan tangan hingga mampu menambah pendapatan dan menghasilkan kreatifitas produk baru. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Mubyarto (1993) menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan Lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam pelaksanaan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) ada faktor-faktor yang dilibatkan baik dari internal Dusun Dukuh ataupun dari eksternal Dusun Dukuh, faktor ini mendukung terwujudnya pemberdayaan di Dusun Dukuh. Dimana faktor internal yaitu SDA dan SDM sedangkan faktor dari luar Dusun Dukuh yaitu program kerja, kebijakan pemerintah, dan pendanaan.

1. Sumber daya alam (SDA) sumber daya alam sebagai modal utama dalam menjalankan program, adanya potensi dari alam yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang kebutuhan hidup bermasyarakat. Pengelolaan Sumber daya alam (SDA) oleh kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai komunitas bersifat *sistemik* dan *holistic*, di mana keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian *integral* yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Baik air, tanah, tumbuhan, udara, hutan dan sejenisnya yang disediakan oleh alam menjadi satu faktor yang mendukung.
2. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku yang terlibat dalam program kerja, keterlibatan anggota dan masyarakat menjadikan program kerja dapat terlaksana dengan baik. Baik dari partisipasi masyarakat dan partisipasi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD). Keterlibatan masyarakat dalam program kerja, baik dari pelaksanaan hingga evaluasi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemberdayaan dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kebijakan pemerintah berupa pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan dan pembangunan dari desa yang dilaksanakan oleh dusun mempererat alasan dasar dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD). Kebijakan berupa pemberdayaan masyarakat menjadi upaya oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh (LPMD) dengan cara pembentukan program kerja oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu kewenangan pemerintah untuk menata dan menstrukturkan skala prioritas baik derajat yang biasa sampai ke kepentingan yang *urgen* termasuk dalam pengelolaan visi misi, strategi, program, kegiatan dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Graham dan Phillips (1998) yang mengungkapkan bahwa pemerintah local memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebijakan yang mengatur partisipasi public dan membangun inovasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

4. Program kerja berupa pembangunan irigasi persawahan dan talub, program penghijauan pembagian benih cabe dan sayuran, dan pembangunan jalan akses penghubung desa. Program kerja dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dinilai penting dan memiliki manfaat yang banyak untuk masyarakat. Program kerja teretus dari kebijakan pemerintah yang dijalankan yang tujuannya dapat memberdayakan masyarakat.
5. Pendanaan, pendanaan atau modal berasal dari pemerintah, pendanaan merupakan asset utama dalam menjalankan sebuah program kerja dalam kelompok untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sampai saat ini pendanaan masih dibantu oleh pemerintah dan masyarakat tidak mengeluarkan modal untuk melakukan program kerja selain waktu, tenaga, pikiran dan bentuk swadaya lain seperti alat pertukangan.

Keberhasilan suatu kebijakan baik dari kinerja dan dampak kebijakan menjadi ukuran keberhasilan suatu kebijakan kondisi tersebut menyaratkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, memobilisasi sumber daya dan melakukan implementasi baik memberikan efek pada produktifitas, pemasukan partisipasi rakyat dan akses pada fasilitas pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pemerintah desa sebagai badan terendah pemerintah menunjukkan pada tugas pekerjaan atau fungsi yang sejalan dengan denyut nadi kehidupan masyarakat atau yang diperintah. Hal ini menunjukkan bahwa desa sebagai badan pemerintah memiliki kepentingan untuk melayani masyarakat atau yang diperintah. Disinilah peran masyarakat desa atau yang dibentuk memiliki tugas utama menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi salah satu kekuatan penting dalam proses pembangunan itulah hakikat dari pemberdayaan. Sehingga diperlukan adanya campur tangan Lembaga Pemerintah tingkat desa atau dusun dalam melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah.

SIMPULAN

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh dalam mewujudkan pemberdayaan di Dusun Dukuh melalui program kerja pembangunan irigasi dan talud, program penghijauan dan pembagian benih sayuran, pembangunan jalan akses penghubung desa yaitu peran manajerial berupa perencanaan mulai dari Menyusun rencana pembangunan dan melakukan pendampingan kepada masyarakat, Lembaga melakukan pengorganisasian baik tugas maupun fungsi sesuai dengan wewenang dan struktur organisasi, Lembaga melakukan pelaksanaan dengan ikut terjun langsung dalam menjalankan program kerja, Lembaga melakukan pengawasan dan evaluasi mulai dari memotivasi masyarakat melakukan koordinasi program kerja dan pengarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya pemberdayaan di Dusun Dukuh terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), SDA berperan sebagai modal utama, sedangkan SDM menjadi pelaku utama dalam proses pemberdayaan. Faktor eksternal menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya pemberdayaan adalah kebijakan pemerintah, program kerja, pendanaan. Kebijakan pemerintah mengatur adanya lembaga, lembaga menjalankan aturan pemerintah berupa pemberdayaan dan program pembangunan yang difasilitasi secara penuh berupa pendanaan lewat desa. Adanya pemerintah sebagai sebuah kebijakan dan program kerja yang didukung oleh pendanaan memberikan hasil terwujudnya program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dukuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati. (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Ranga Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang). Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Azam, Awang. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Pusataka Pelajar. Studi kajian pemberdayaan berdasarkan kearifan local di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Sukeesi *et.al.*, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam...

Ayu, F.L. (2019). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.

DPRD Kabupaten Sleman. (2004). *Lembaga Kemasyarakatan Desa.*(Peraturan Daerah Kabuapten Sleman Nomor 3 Tahun 2004)

Sidik, F. F. S., Nasution, F. G. A., IP, S., & Herawati, H. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Untuk Memberdayakan Masyarakat Dengan Pendekatan “Hybrid Institutions”. *Sosio Konsepsia*, 8 (1), 71-96.

Ibori, Anthonius. (2006). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni District Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. Papua barat : Governance.

Ife, J. (2008). *Community Development*. Terjemahan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Irmawati, I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Jamaludin, A. N., 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Pustaka Setia. Bandung

Kirana, M. A., Susanto, T. A., & Soraida, S. (2018). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Partisipatif (Studi Di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin) (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 158-190.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodeklogi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.

Pondaag, Alfira, Gosal Ronny, Kimbal Alfon. (2017). Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2 No.2 ISSN:2337-5736

Rafsanzani, H. (2013). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 67-72.

Sastropoetro, RA. Santoso. (1998). Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam pembangunan. Penerbit Alumni : Bandung.

Tari, P. U., Adawiyah, R., & Sasnifa, P. (2019). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).

Tansia, T. G. (2017). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Kaligandu Kecamatan Serang. Lembaran Masyarakat: *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 23-40.

Hutagalung, N. (2017). Skripsi. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Pintu Padang Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan).